

BAB II

KAJIAN TEORI

2.1 Partisipasi Politik

Secara etimologi partisipasi berasal dari bahasa latin, yaitu *pars* yang berarti bagian dan *capere* yang berarti mengambil. Jika digabungkan maka dapat kita artikan “mengambil”. Dalam bahasa inggris *participate* atau *participation* berarti mengambil bagian atau mengambil peranan. Jadi partisipasi politik dapat diartikan sebagai suatu tindakan untuk mengambil bagian atau mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik suatu negara.

Miriam Budiardjo dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Ilmu Politik menyatakan bahwa partisipasi politik secara umum dapat didefinisikan sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pemimpin negara dan langsung atau tidak langsung memberikan pengaruh terhadap kebijakan publik (*public policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan (*contracting*) dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, dan sebagainya.

Herbert McClosky (dalam Budiardjo, 2008) berpendapat bahwa partisipasi politik merupakan kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsu

atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum. Sementara menurut Canter (Arimbi, 1993) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat sebagai proses komunikasi dua arah antara pemerintah sebagai pemegang kebijakan dan masyarakat dipihak lain sebagai pihak yang merasakan langsung dampak dari kebijakan tersebut. Maka secara umum, partisipasi politik dapat dipahami sebagai kegiatan masyarakat yang dilakukan oleh individu maupun kelompok dalam aktifitas-aktifitas kehidupan sosial dan politik, seperti mampu memberikan pandangan dan menjadi bagian dalam proses pembuatan keputusan dan berbagai aktivitas perencanaan lain baik itu secara langsung maupun tidak langsung.

(Surbakti, 2010) menyatakan bahwa topologi partisipasi politik warga negara dibedakan menjadi dua, yaitu partisipasi aktif dan partisipasi pasif.

1. Partisipasi Aktif

Merupakan suatu kegiatan warga negara dalam ikut serta menentukan kebijakan dalam pemilihan pejabat pemerintahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara demi kepentingan bersama.

2. Partisipasi Pasif

Merupakan suatu kegiatan warga negara yang mendukung jalannya pemerintahan dalam rangka menciptakan kehidupan yang sesuai tujuan. Bentuk partisipasi antara lain mentaati peraturan yang berlaku dan melaksanakan kebijakan pemerintah.

Menurut Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson (1994: 6) asal-usul individu atau kelompok yang melakukan kegiatan partisipasi politik dapat dilihat dari beberapa perspektif:

- a. kelas, adalah individu yang memiliki latar belakang status sosial, pendapatan, dan pekerjaan yang serupa. Mereka dapat terorganisir dalam kelompok-kelompok yang memiliki tujuan dan kepentingan yang sama, seperti kelompok buruh atau kelompok karyawan profesional.
- b. kelompok atau komunal, merupakan individu-individu yang didalamnya dengan asal-usul ras, agama, bahasa, atau etnis yang serupa. Mereka dapat terlibat dalam partisipasi politik yang dipengaruhi oleh identitas komunal mereka, seperti gerakan hak-hak sipil atau gerakan kebangsaan.
- c. lingkungan, individu yang memiliki tempat tinggal berdekatan. Mereka dapat terlibat dalam partisipasi politik lokal, seperti kegiatan komunitas atau kegiatan masyarakat yang berfokus pada masalah-masalah lokal.
- d. partai, individu yang mengidentifikasi diri dengan organisasi formal yang sama yang berusaha untuk meraih atau mempertahankan kontrol atas bidang eksekutif dan legislatif. Partai-partai politik seringkali menjadi platform bagi individu untuk berpartisipasi dalam proses politik melalui kampanye, lobi, dan kegiatan lainnya.
- e. golongan atau fraksi Individu-individu yang dipersatukan oleh interaksi yang terus menerus antara satu dan lainnya, yang akhirnya membentuk hubungan patron-client. Golongan atau fraksi ini dapat terbentuk atas orang-orang dengan tingkat status sosial, pendidikan, dan ekonomi yang tidak sederajat. Mereka dapat terlibat dalam partisipasi politik yang lebih kompleks dan dinamis.

Dari perspektif-perspektif ini, Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson (1994) juga mengemukakan bentuk partisipasi politik dapat dibedakan menjadi konvensional dan nonkonvensional. Bentuk partisipasi politik konvensional mencakup kegiatan-kegiatan seperti pemberian suara, kampanye, dan lobi, sedangkan bentuk partisipasi politik nonkonvensional mencakup kegiatan-kegiatan seperti demonstrasi, petisi, dan tindakan kekerasan.

Partisipasi politik dapat didefinisikan sebagai aktivitas warga negara yang mempengaruhi politik. (Jan Willem van Deth, 2014) Dari berbagai cara untuk mempengaruhi politik, "tindakan yang bertujuan mempengaruhi keputusan pemerintah" adalah salah satu yang paling dikenal (Sidney Verba, 1987).

Sidney Verba dan Norman H. Nie dalam bukunya berjudul *"Participation in America"* (1972) menjelaskan bahwa partisipasi politik dipengaruhi oleh berbagai faktor. Diantaranya sumber daya, sikap psikologis, jaringan sosial, lingkungan sosial dan demografis, serta kesempatan struktural. Mereka menekankan bahwa waktu luang, ketersediaan finansial, dan keterampilan sipil seperti kemampuan komunikasi dan organisasi memudahkan individu untuk terlibat dalam aktivitas politik. Selain itu, minat politik, pengetahuan tentang sistem politik, dan rasa efikasi politik—kepercayaan bahwa tindakan seseorang dapat mempengaruhi hasil politik—juga merupakan elemen penting yang mendorong partisipasi. Faktor-faktor ini didukung oleh jaringan sosial, di mana individu yang terlibat dalam kelompok atau komunitas yang aktif secara politik lebih mungkin untuk berpartisipasi. Lingkungan sosial dan demografis, termasuk pendidikan, pekerjaan, pendapatan, usia, jenis kelamin, dan etnisitas, juga memainkan peran signifikan. Di

sisi lain, kesempatan struktural, seperti sistem politik yang ada, aksesibilitas informasi, dan frekuensi pemilu, menentukan seberapa besar kesempatan seseorang untuk terlibat dalam politik. Semua faktor ini berkontribusi dalam membentuk tingkat dan bentuk partisipasi politik dalam suatu masyarakat.

Kajian teori yang mendasari penelitian ini adalah teori pilihan rasional (*rational choice theory*) yang diperkenalkan oleh Anthony Downs pada tahun 1957 menjelaskan bahwa pemilih dipahami sebagai agen rasional yang mengambil keputusan berdasarkan upaya untuk memaksimalkan utilitas atau keuntungan yang mereka dapatkan dari tindakan politik mereka. Manfaat yang dipertimbangkan oleh pemilih dalam membuat keputusan mereka berasal dari aktivitas pemerintah, Seorang pemilih rasional selalu memilih yang memberinya utilitas tertinggi (*ceteris paribus*), yaitu ia bertindak untuk mendapatkan manfaat terbesar bagi dirinya sendiri. Teori ini juga berasumsi bahwa perilaku politik individu yang mana salah satunya adalah berpartisipasi dalam pemilihan umum, tidak terlepas dari perhitungan rasional terhadap manfaat dan probabilitas dari berbagai alternatif yang tersedia. Pemilih tidak selalu memberikan suara hanya berdasarkan preferensi ideologis atau afiliasi emosional. Mereka juga mempertimbangkan apakah partisipasi politik mereka seperti memilih dalam pemilu akan memberikan dampak nyata yang menguntungkan. Jika seorang pemilih merasa bahwa suara mereka tidak akan mempengaruhi hasil akhir pemilihan, mereka mungkin memilih untuk tidak berpartisipasi sama sekali. Hal ini menjelaskan mengapa tingkat partisipasi politik seringkali dipengaruhi oleh persepsi pemilih mengenai efektivitas suara mereka (Downs, 1957).

Probabilitas untuk mempengaruhi hasil juga berfungsi sebagai dorongan penting dalam berpartisipasi. Dari segi efikasi internal dan eksternal (Craig dan Maggiotto, 1982). Efikasi internal mencerminkan keyakinan individu terhadap kemampuan mereka dalam memahami dan terlibat dalam politik, yang berhubungan dengan tingkat partisipasi yang lebih tinggi (E. Q. M. and M. S. Marc Hooge, 2013; Valentino NA, 2008). Sedangkan, efikasi politik eksternal merujuk pada persepsi terhadap responsivitas pemerintah, yang juga mendorong partisipasi politik (Karp JA and Banducci SA, 2008; (Sjoberg et al, 2015). Orang-orang cenderung berpartisipasi dalam politik ketika mereka percaya bahwa tindakan mereka akan membawa dampak, baik karena mereka merasa mampu mempengaruhi sistem, atau karena pemerintah dianggap bersedia mendengar keluhan mereka dan mampu bertindak sesuai (Hooghe M dan Marien S, 2014).

Partisipasi pemilih dan kegiatan institusional sering melihat kepercayaan sebagai sebuah sumber daya (Almond dan Verba, 1963). Namun, para peneliti yang mempelajari perilaku protes dan aktivitas non-institusional lainnya menunjukkan bahwa ketidakpercayaan dapat berfungsi sebagai insentif, sementara kepercayaan justru bisa menjadi disinsentif untuk berpartisipasi (Gamson WA, 1968). Perbedaan pandangan ini umumnya dijelaskan dengan argumen bahwa individu yang memiliki kepercayaan lebih cenderung memilih untuk terlibat dalam aktivitas yang terintegrasi dengan kerangka institusi yang ada, dan menghindari partisipasi dalam kegiatan yang berada di luar struktur yang ada atau yang menantang elit.

Kepercayaan bisa mempengaruhi partisipasi politik dalam beberapa cara berbeda. Pertama, kepercayaan dapat mengubah preferensi seseorang terhadap jenis

tindakan tertentu, sehingga seseorang lebih memilih beberapa jenis tindakan dibandingkan yang lain. Kedua, kepercayaan dapat mengurangi dorongan untuk berpartisipasi dengan meningkatkan toleransi terhadap hasil kebijakan yang mungkin merugikan, yang biasanya seharusnya mendorong partisipasi. Ketiga, kepercayaan dapat meningkatkan dorongan untuk berpartisipasi dengan memengaruhi keyakinan seseorang mengenai seberapa efektif tindakan mereka (Ouattara dan Steenvoorden, 2023).

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terkait Pengaruh Kesadaran Politik dan Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Partisipasi Politik Pemilih Pemula (Studi *Ex Post Facto* di Kelurahan Gunung Tandala) bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam bagaimana kedua variabel ini, yaitu kesadaran politik dan kepercayaan pada pemerintah mempengaruhi partisipasi politik di kalangan pemilih pemula di wilayah tersebut. Dengan menggunakan pendekatan rasional untuk menganalisis bagaimana tingkat kesadaran politik dan tingkat kepercayaan terhadap pemerintah dapat berkontribusi pada keputusan pemilih pemula untuk berpartisipasi dalam proses politik, khususnya dalam konteks pemilihan umum yang diselenggarakan pada 14 Februari lalu.

Penelitian terdahulu merupakan alat perbandingan juga landasan bagi penelitian yang sedang penulis lakukan, adanya penelitian terdahulu ini juga untuk mendukung ketajaman dari penelitian. Penelitian terkait Pengaruh Kesadaran Politik Terhadap Partisipasi Politik dan Kepercayaan Politik Terhadap Partisipasi Politik, diantaranya adalah :

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama peneliti	Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Elly Hasan Sadeli, Razif Algiffary Sukma, Wildan Nurul Fajar, Efi Miftah Faridli	2020	Pengaruh Kesadaran Politik Terhadap Partisipasi Politik di Masa Pandemi Covid-19 dalam Pemilihan Kepala Daerah 2020	Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh positif yang signifikan kesadaran politik terhadap partisipasi politik masyarakat desa Cipatujah kabupaten Tasikmalaya dalam pemilihan kepala daerah 2020.	Lokasi penelitian di Desa Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya. Fokus pada kesadaran politik saja.
2.	Rabiatul Munawarah, Andreas Agung Kristanto	2022	Alienasi Pemuda dalam Politik: Peran Nilai dan Kepercayaan Politik Pada Partisipasi Politik Pemilih Pemula	Hasil analisis uji Somers'd menunjukkan bahwa Kepercayaan politik memberikan kontribusi sebesar 3,2% terhadap partisipasi politik, sedangkan 96,8% ditentukan oleh faktor lain.	Fokus penelitian pada pemilih pemula tanpa lokasi spesifik. Penelitian ini lebih menekankan pada kepercayaan politik dan nilai-nilai politik.
3.	Sawitri Layungsari, Sitti Chotidjah, Gemala Nurendah	2024	Pengaruh Kepercayaan Politik dan Kesadaran Politik Terhadap Intensi Partisipasi Politik Pada Pemilih Pemula	Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kepercayaan politik dan kesadaran politik terhadap intensi partisipasi politik pada pemilih pemula	Penelitian dilakukan pada pemilih pemula, tetapi tidak disebutkan lokasi spesifik. Fokus pada kombinasi pengaruh kesadaran politik dan

					kepercayaan politik.
4.	Dian Nurul Fathonah, Sunarso.	2023	Pengaruh Kesadaran dan Kepercayaan Politik terhadap Partisipasi Politik pada Pemilihan Kepala Desa Sidomulyo Tahun 2022	Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan kesadaran politik dan kepercayaan politik secara bersama-sama terhadap partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Kepala Desa Sidomulyo, Kapanewon Bambanglipuro, Kabupaten Bantul Tahun 2022.	Subjek penelitian tidak hanya pemilih pemula. Fokus pada pengaruh gabungan kesadaran politik dan kepercayaan politik terhadap partisipasi politik dalam pemilihan kepala desa.
5.	Ferdinal Mensana, Ersan Lanang Sanjaya	2020	Kepercayaan Politik dan Intensi Memilih: Perilaku Politik Pemilih Remaja Akhir di Surabaya Menjelang Pemilu 2019	Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara kepercayaan politik dan intensi memilih pemilih berusia remaja akhir dalam Pemilu 2019 sebagaimana diperlihatkan dalam kasus mahasiswa di universitas di Surabaya.	Penelitian hanya berfokus pada pengaruh kepercayaan pemilih dan intensi memilih.
6.	Mery Anggraini, Asrinaldi, Aidinil Zetra	2018	Pengaruh Kesadaran Dan Kepercayaan Politik Terhadap Partisipasi	Hasil penelitian bahwa Kabupaten Dharmasraya memiliki tingkat partisipasi politik pada Pilkada Serentak Tahun	Lokasi penelitian dilakukan dalam ruang lingkup kabupaten.

			Politik Masyarakat Dharmasraya Pada Pilkada 2015	2015 mencapai 72,91 % dikarenakan kesadaran politik dan kepercayaan terhadap sistem pemerintahan juga tinggi. Masyarakat menjadi terdorong untuk terlibat dalam setiap kegiatan politik	
7.	Maya Yuliantina	2016	Pengaruh Kesadaran Politik terhadap Partisipasi Politik dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Hajimena, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran politik masyarakat rendah, dengan rata-rata nilai. Partisipasi politik dalam pemilihan kepala desa tahun 2015 juga rendah, dengan nilai rata-rata. Mayoritas masyarakat tidak berpartisipasi dalam kegiatan politik seperti kampanye atau pemilihan kepala desa.	Variabel independent dalam penelitian hanya berfokus pada kesadaran politik. Penelitian dilakukan pada Pemilihan Kepala Desa.
8.	Aidinil Zetra, Kartini Aboo Talib Khalid, Ferra Yanuar, Susi Marisa	2022	Political Awareness, Knowledge, and Participation Relationship Using Structural Equation Modeling Approach	Hasil penelitian menemukan bahwa kesadaran politik tidak mempengaruhi partisipasi politik, namun pengetahuan politik mempengaruhi partisipasi politik.	Variabel dalam penelitian tidak hanya kesadaran politik, adapula variabel pengetahuan politik.

9.	Audrey Low Siang Ling, Arnold Puyok.	2024	The Impacts of Undi 18 on Political Participation, Awareness and Readiness	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Meskipun mayoritas responden sadar dan siap untuk berpartisipasi sebagai pemilih, sejumlah besar dari mereka belum siap untuk bentuk partisipasi politik yang lebih tinggi.	Lokasi Penelitian dilakukan di Malaysia, dan terdapat variabel kesiapan dalam penelitian ini.
10.	Lee, Sung Choon	2017	The Influences of Political Participation Awareness upon Citizens' Political Participation Action	Hasil penelitian menemukan bahwa semakin tinggi kesadaran politik warga, seperti rasa pemilu dan pengetahuan tentang politisi mereka, semakin positif keandalan politik dan partisipasi politik mereka.	Lokasi penelitian dilakukan di Korea Selatan.

2.3 Kerangka Berfikir

2.3.1 Kesadaran Politik

Kesadaran politik diartikan sebagai pemahaman dan bagaimana mengimplementasikan hak serta kewajiban seseorang sebagai warga negara. Hal tersebut berkaitan dengan pengetahuan tentang lingkungan sosial politik serta minat dan perhatian terhadap pemerintahan. (Almond Verba, 1963) menyatakan seseorang dikatakan memiliki kesadaran politik ketika ia memahami dan mengetahui aspek-aspek yang berkaitan dengan sistem politik, baik dari segi *input*

maupun *output*. Input dalam hal ini meliputi tuntutan atau dukungan dari masyarakat terhadap pemerintah, sementara output adalah keputusan, tindakan, atau hasil kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah. Pendapat ini sejalan dengan Ramlan Surbakti (2010), yang juga mendefinisikan kesadaran politik sebagai pemahaman dan pemanfaatan hak serta kewajiban sebagai warga negara.

Dalam kesadaran politik, pengetahuan dan pemahaman seseorang tentang sistem politik berkaitan dengan aspek kognitif. Sementara itu, sikap seseorang dalam kesadaran politik berhubungan dengan aspek afektif. Tingkat tindakan atau perilaku merupakan hasil gabungan dari keduanya, yaitu aspek evaluatif. Menurut Gabriel Almond dan Sidney Verba, ada tiga pola kesadaran politik:

1. Kesadaran *Input*, adalah bagaimana kondisi seseorang terlibat dalam politik dan mengikuti perkembangan atau masalah pemerintahan. *Input* yang dimaksud dalam hal ini mencakup dukungan atau tuntutan terhadap sistem politik (Surbakti, 2010). Indikator dari kesadaran input bisa diukur dengan pemahaman terhadap berita politik, sistem pemilihan umum, kehadiran dalam rapat masyarakat, dan partisipasi dalam organisasi kepemudaan (Sitepu, 2012).
2. Kesadaran *Output*, adalah bagaimana pemahaman seseorang tentang dampak kebijakan pemerintah terhadap hidup mereka. Kesadaran *output* diukur melalui indikator seperti pengetahuan tentang kebijakan pemerintah saat ini, peraturan pemerintah, dan bagaimana kebijakan tersebut mempengaruhi kehidupan sehari-hari (Sitepu, 2012).

3. Penerimaan Informasi Politik, adalah seberapa jauh seseorang mengakses informasi politik dan merasa bebas untuk menyampaikan opini mereka. Ini bisa diukur dengan seberapa baik masyarakat mengenal pejabat publik, menteri, partai politik, dan kebebasan mereka dalam mengungkapkan pendapat di depan umum(Sitepu, 2012).

2.3.2 Kepercayaan Pada Pemerintah

Menurut Miller dan Listhaug (dalam Munawarah & Kristanto, n.d.) kepercayaan politik adalah inti dari definisi demokrasi yang mana hal tersebut menggambarkan evaluasi publik yang seringkali menilai apakah otoritas politik dan lembaga-lembaga yang menjalankan kekuasaan bertindak sesuai dengan harapan yang mereka miliki tentang bagaimana seharusnya sistem politik bekerja. Penilaian ini didasarkan pada standar atau ekspektasi normatif yang dimiliki oleh masyarakat.

Dimensi-dimensi kepercayaan politik terbagi menjadi tiga, diantaranya :

1. *Ability* (Kemampuan), yang merujuk pada keyakinan bahwa institusi politik memiliki kemampuan dan kapasitas yang memadai untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka secara efektif. (Lewicki, 1998) kemampuan ini juga mencakup keyakinan masyarakat bahwa pemerintah mampu menangani berbagai permasalahan yang dihadapi dengan baik.
2. *Integrity* (Integritas), yang mengacu pada kepercayaan bahwa lembaga-lembaga politik bertindak sesuai dengan standar moral dan etika yang tinggi, serta bebas dari tindakan korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan. (Lewicki, 1998) menyatakan bahwa integritas ini menumbuhkan keyakinan

bahwa keputusan dan tindakan pemerintah dijalankan dengan jujur dan transparan.

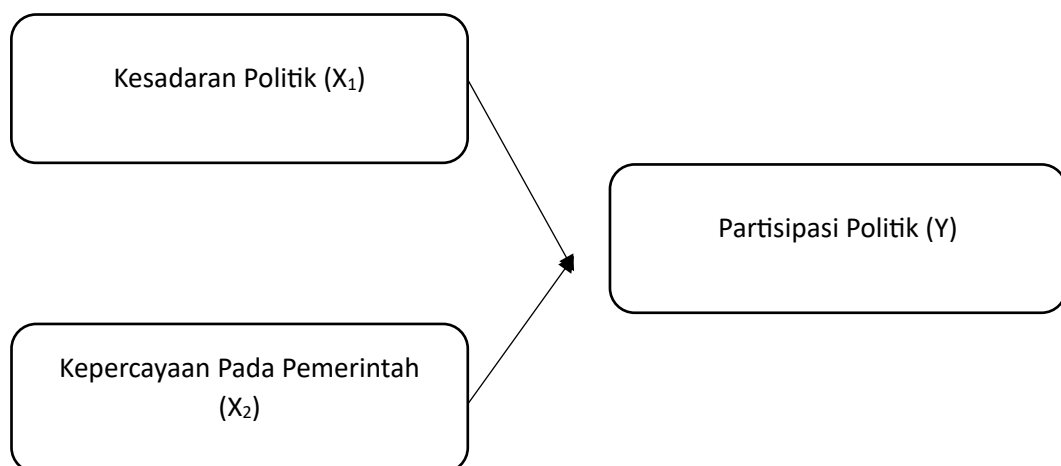
3. *Benevolence* (Kebaikan Hati), yang mengacu pada keyakinan bahwa institusi politik memiliki niat baik dan perhatian yang tulus terhadap kesejahteraan masyarakat. (Lewicki, 1998) menegaskan bahwa *benevolence* menggambarkan bahwa pemerintah beroperasi demi kepentingan publik, bukan hanya untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu.

Berdasarkan teori pilihan rasional yang dikemukakan oleh Downs, partisipasi politik dipandang sebagai hasil dari perhitungan antara biaya dan manfaat yang terkait dengan tindakan politik. Individu melakukan "kalkulasi" ketika memutuskan apakah akan terlibat dalam aktivitas politik atau tidak. Mereka lebih cenderung untuk berpartisipasi jika manfaat yang diperoleh dari partisipasi tersebut dianggap lebih besar daripada biaya yang harus dikeluarkan. Dalam konteks ini, partisipasi politik bersifat sukarela dan manfaat yang diperoleh bersifat kolektif, mencakup peluang untuk mempengaruhi hasil serta manfaat dari hasil tersebut. Teori ini menyarankan bahwa individu mengevaluasi potensi manfaat dan pengaruh yang dapat diperoleh sebelum memutuskan untuk berpartisipasi.

Secara empiris menunjukkan bahwa manfaat seperti preferensi terhadap kandidat atau dampak kebijakan bisa mempengaruhi bentuk partisipasi politik lainnya, baik itu dalam pemilu atau bentuk partisipasi lain yang berdampak langsung pada kepentingan pribadi seseorang, penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa individu dengan kesadaran politik yang tinggi dan kepercayaan yang kuat

terhadap pemerintah cenderung lebih aktif dalam berpartisipasi dalam proses politik. Hasil-hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilih pemula, ketika memiliki pemahaman yang baik tentang hak-hak politik mereka dan kepercayaan pada kinerja pemerintah, lebih mungkin untuk terlibat secara aktif dalam pemilu dan kegiatan politik lainnya. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana kedua faktor ini berinteraksi dan mempengaruhi partisipasi politik pemilih pemula dalam konteks pemilu.

Gambar 2.3.1 1
Kerangka Berfikir



2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis yaitu jawaban yang bersifat sementara atas rumusan masalah, yang dimana rumusan masalah telah dibuat dalam bentuk pertanyaan (Sugiyono, 2016).

Pada penelitian ini hipotesis yang peneliti rumuskan sebagai berikut:

- H₁ terdapat pengaruh signifikan antara kesadaran politik dan kepercayaan pada pemerintah terhadap partisipasi politik pemilih pemula di Kelurahan Gunung Tandala.

- H₂ terdapat pengaruh signifikan kesadaran politik terhadap partisipasi politik
- H₃ Terdapat pengaruh signifikan kepercayaan pada pemerintah terhadap partisipasi politik